

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Deponering

Di era modern banyak negara yang sangat menjunjung supremasi hukum setiap negara mempunyai sistem peradilan pidana yang khas karena memiliki latar belakang sejarah dan perkembangan masyarakat yang berbeda, tetapi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi membuat batas-batas negara menjadi tanpa batas mengarah pada persamaan dan menghilangkan perbedaan. Sistem hukum suatu negara akan terbentuk dari pertumbuhan tata nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat dan organisasi alat perlengkapan negara penegak hukum negara itu sendiri. Pandangan sejarah, sosial ekonomi, filsafat, dan politik bangsa merupakan sumber yang menentukan terbentuknya pola sistem hukum, selanjutnya dikatakan: ¹

“ Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum Ketentuan ini tercantum dalam penjelasan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa, “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum,”

hal ini sudah sesuai dengan dengan hakekat tujuan didirikannya negara Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Oleh sebab itu seluruh aspek kehidupan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan diatur dan di tata di dalam hukum, sehingga permasalahan yang timbul dalam masyarakat di selesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku (*rule of law*).

Dengan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, setiap warga Negara yang terbukti melanggar hukum yang berlaku akan mendapat sanksi sesuai perbuatan yang dilakukannya. Bisa

¹ Bambang Poernomo, 1998, “*Pola Dasar Teori–Azas Umum Hukum Acara Pidana Penegakan Hukum Pidana*”, Liberty, Yogyakarta, , Hml. 70.

dikatakan, hukum tidak memandang siapa itu pejabat, rakyat sipil atau militer, jika melanggar hukum akan mendapat sanksi sesuai perbuatan yang dilakukannya.

Oleh karena itu sudah sepantasnya setiap orang yang melakukan perbuatan baik perbuatan yang melanggar hukum atau tidak melanggar hukum akan mendapatkan akibat dari perbuatannya tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Karni yang mengatakan bahwa :²

“Bagian dari hukum yang mengadakan dasar atau aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka.”

Permasalahan lain juga terlihat dari beberapa permasalahan yang menjadi pertanyaan adalah dapatkah suatu perbuatan yang sudah jelas-jelas merupakan perbuatan pidana tidak dikenai sanksi pidana?³

“Praktek yang diturut penuntut umum di Indonesia sejak jaman Belanda adalah lain, yaitu menganut prinsip oportunitas yang menggantungkan hal akan dilakukan suatu tindakan kepada keadaan yang

²Karni, 1995, *“Ringkasan Tentang Hukum Pidana”*, Balai Buku Indonesia, Jakarta-Surabaya, hlm, 9.

³R. Wiryono Projodikoro, 1981, *“Hukum Acara Pidana Di Indonesia Sumur Bandung”*, Bandung, , hlm. 21

nyata dan ditinjau satu persatu. Dalam praktek ada kalanya, sudah terang seseorang melakukan suatu kejahatan akan tetapi keadaan yang nyata adalah sedemikian rupa, sehingga kalau seseorang dituntut di muka hakim, kepentingan Negara akan sangat dirugikan”.

Secara sederhana deponering dapat di pahami sebagai wewenang jaksa agung untuk tidak menuntut suatu perkara karena alasan kebijakan. Perkara tersebut tidak di limpahkan ke pengadilan melainkan di “kesampingkan”.

1. Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Deponering adalah hak istimewa kejaksaan untuk mengesampingkan perkara karena alasan kepentingan umum yang lebih besar yang akan dilindungi. Hak tersebut di atur dalam pasal 35 huruf b Undang – Undang Nomer 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berbunyi , "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum". Dalam hal ini bisa di lakukan apabila sudah menerima legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan di dalam KUHAP pasal 46 ayat 1 huruf yang berbunyi: “Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”. dan terdapat dalam Penjelasan Pasal 77 KUHAP berbunyi: “Yang dimaksud dengan penghentian penuntutan

tidak termasuk penyimpangan perkara untuk kepentingan umum menjadi wewenang Jaksa Agung”.⁴

Sudah jelas bahwa kebijakan penutupan demi kepentingan umum di percayakan dan di pertanggung jawabkan oleh Jaksa Agung selaku sebagai penuntut umum tertinggi . dan satu hal yang perlu di jelaskan adalah apakah yang di maksud dengan “demi kepentingan umum” dalam mendeponering suatu perkara, pedoman pelaksanaan nya ada di dalam KUHAP (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP) memberikan penjelasan sebagai berikut: “Dengan demikian kriteria “demi kepentingan umum” dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat”

2. Menurut Para Ahli

Hukum penyimpangan perkara pidana deponeering dalam proses pidana adalah sebagai pengecualian dari asas legalitas. Menurut A.L.Melai, tidak diadakannya penuntutan oleh Jaksa sebagai penuntut umum adalah merupakan penemuan hukum baru *Rechtvinding* yang harus dipertimbangkan masak-masak berhubung hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan hukum.Pasal 35 sub c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengatakan penyimpangan perkara deponeering demi kepentingan umum adalah

⁴P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, 2010, “ *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*”, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 297

sebagai berikut: yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badanbadan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.⁵

Osman Simanjuntak mengatakan bahwa penyampingan perkara ini adalah wewenang yang diberikan undang-undang kepada Jaksa Agung RI untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Adapun dasar penyampingan perkara ini, karena hukum acara kita menganut asas oportunitas. Dimana suatu perkara (perbuatan pidana) bilamana dilimpahkan ke persidangan diperkirakan akan menimbulkan suatu goncangan di kalangan masyarakat atau dengan penyidangan perkara tersebut akan menimbulkan akibat negatif di kalangan masyarakat luas.⁶

3. Pelaksanaan Deponering dalam KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Undang-Undang yang hukumnya berlandaskan asas legalitas.

⁵Djoko Prakoso, 1985, *“Eksistensi Jaksa Di tengah-tengah Masyarakat”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, , hal. 89-90

⁶Osman Simanjuntak, 1995, *“Tehnik Penuntutan Dan Upaya Hukum”*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, , hal. 90

Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada the rule of law, yang berarti aparat penegak hukum tidak dibenarkan:⁷

- a) Bertindak di luar ketentuan hukum, atau *undue to law* maupun *undue process*.
- b) Bertindak sewenang-wenang, atau *abuse power*.
- c) Setiap orang, baik dia tersangka atau terdakwa mempunyai kedudukan yang sama derajat dihadapan hukum, atau *equal before the law*.
- d) Mempunyai kedudukan “perlindungan” yang sama oleh hukum *equal protection on the law*.
- e) Mendapat perlakuan keadilan” yang sama dibawah hukum, *equal justice under the law*.

Dapat di ketahui , bertolak belakang dengan asas legalitas yang dalam hal ini adalah asas “oportunitas” yang berarti seorang tersangka terang cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum. Kasus perkara itu dideponiring oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi kepentingan umum”. Dengan demikian, perkaranya dikesampingkan (dideponiring). Cara penyampingan seperti inilah yang disebut asas oportunitas.

⁷ M. Yahya, 2000, “Pembahasan Permasalahan dan Penyidikan dan Penuntutan”, Sinar Grafika: Jakarta.hal 36

Selanjutnya marilah kita lihat juga Pasal 14 (h) KUHAP : “Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk menutup perkara demi kepentingan hukum” dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP : “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.⁸

Dari kedua peraturan tersebut diatas, kita dapat menarik pengertian tentang deponering atau penyampingan perkara, yaitu : a. Perkara dihentikan penuntutannya demi kepentingan hukum (Pasal 140 ayat 2 (a) KUHAP) b. Perkara ditutup demi hukum (Pasal 14 (h) jo Pasal 140 ayat 2 (a) KUHAP) c. Penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung (Undang-undang No 16 Tahun 2004) Apabila hal ini kita kaitkan dengan hukum pidana materiil, maka penyampingan perkara terdiri dari dua golongan yaitu : a. Penyampingan perkara berdasarkan azas oportunitas b. Penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana *strafrechtelijk*.

Namun kedua hal ini mempunyai perbedaan, oleh karena itu haruslah dibedakan dengan jelas antara tindakan hukum penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara. Malah pada penjelasan Pasal 77 KUHAP telah ditegaskan; “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang

⁸Pasal 35 huruf c dan Penjelasanannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

menjadi wewenang Jaksa Agung”. Terlepas dari kenyataan bahwa KUHAP masih memberi lubang oportunitas dalam penegakan hukum, mari kita bicarakan dimana letaknya perbedaan antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara.

4. Mengkesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum.

Kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas adalah keputusan untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan, yakni deponering. Kepentingan umum dalam hal ini adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas, sehingga perlu dibuat suatu kriteria tentang kepentingan umum tersebut untuk dijadikan pedoman bagi Jaksa Agung dalam menerapkan wewenangnya melakukan deponering. Bahwa kepentingan umum yang dimaksud merujuk pada pendapat J.M Van Bemmelen, terdapat 3 (tiga) alasan untuk tidak dapat melakukan penuntutan yaitu:⁹

- a) Demi Kepentingan Negara (staatsbelang) Kepentingan negara tidak menghendaki suatu penuntutan jika terdapat kemungkinan bahwa aspek-aspek tertentu dari suatu perkara akan memperoleh tekanan yang tidak seimbang. Sehingga kecurigaan yang dapat timbul pada rakyat, dalam keadaan tersebut menyebabkan kerugian besar pada negara. Contohnya ialah bila terjadi penuntutan akan berakibat suatu pengumuman (openbaring) yang tidak dikehendaki dari rahasia negara.

⁹ Andi Hamzah, 2004, “*Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 156.

- b) Demi Kepentingan Masyarakat (maatschapelijk belang) Tidak dituntutnya perbuatan pidana karena secara sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk dalam kategori ini tidak menuntut atas dasar pemikiran- pemikiran yang telah atau sedang berubah dalam masyarakat. Contohnya pendapat-pendapat yang dapat berubah atau sedang berubah tentang pantas tidaknya dihukum beberapa delik susila.
- c) Demi Kepentingan Pribadi (particular belang) Termasuk didalamnya kategori-kategori bila kepentingan pribadi menghendaki tidak dilakukannya penuntutan ialah persoalan-persoalan hanya perkaraperkara kecil. Penyimpangan perkara yang dilakukan demi kepentingan pribadi dapat merugikan, jika keuntungan yang diperoleh dari penuntutan adalah tidak seimbang dengan kerugian-kerugian yang timbul terhadap terdakwa dan masyarakat, maka kepentingan negara akan sangat dirugikan.¹⁰

Kepentingan umum dalam suatu negara mempunyai peranan aktif dan peranan pasif. Dalam peranan aktif, kepentingan umum menuntut eksistensi dari hukum dan sebagai dasar menentukan isi hukum agar tujuan hukum dapat dicapai. Kepentingan umum yang dimaksud dalam hal ini adalah mengenai cita-cita hukum. Sedangkan dalam peranan pasif, kepentingan umum yang diatur dalam suatu peraturan hukum apabila dilanggar tidak dapat dijadikan sebagai landasan oportunitas untuk

¹⁰ Ibid.

menyampingkan perkara pidana. Sebab kepentingan umum menuntut agar diadakan penuntutan di muka hakim pidana untuk dijatuhkan pidana yang setimpal. Di bawah ini dapat dibandingkan antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi dalam hubungannya dengan pelaksanaan asas oportunitas yaitu: ¹¹

- 1) Apabila tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi negara dan tidak terhadap kepentingan masyarakat, sedangkan kerugian dari akibat tersebut dirasakan tidak mempengaruhi jalannya pemerintahan, maka perkara itu dapat dikesampingkan.
- 2) Apabila tindak pidana tersebut tidak merugikan bagi kepentingan penyelenggara negara namun berakibat terganggunya kehidupan masyarakat atau timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, maka perkara tersebut tidak dapat dikesampingkan.

B. Asas Kepastian Hukum

Kepastian dalam hukum pidana, kepastian hukum selalu berkaitan dengan asas legalitas sebab Andi Hamzah menyebutkan bahwa “Kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari perlakuan yang tidak wajar dan tidak adil dari penguasa dan hakim sehingga diperlukan adanya asas itu.”¹² Sehingga dengan adanya suatu kepastian hukum terhadap masyarakat Indonesia diharapkan masyarakat tidak menjadi bingung dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sebab seperti yang kita ketahui banyak sekali hukum di Indonesia yang tidak

¹¹ Ibid.

¹² Andi Hamzah, 2017, “*Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 41.

memberikan kepastian terhadap masyarakat dan terlebih lagi terhadap masyarakat kecil yang merasa bahwa mereka selalu ditindas dengan adanya aturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu asas legalitas ini muncul dalam ranah hukum pidana di Indonesia, agar masyarakat memiliki acuan atau pedoman untuk dijamin kepastian hukumnya dalam pidana.¹³

Untuk terjaminnya kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan asas oportunitas. Jaksa Agung menuangkan dalam suatu surat penetapan/keputusan yang salinannya diberikan kepada yang dikesampingkan perkaranya demi kepentingan umum, yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi yang bersangkutan. Terhadap perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum, penuntut umum tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap tersangka dalam perkara tersebut dikemudian hari.

C. Tinjauan Asas *Equality Before Of The Law*

Asas *equality befor the law* tercatat di dalam penjelasan umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa setiap orang mendapat perlakuan yang sama di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.¹⁴

Disamping itu, asas ini juga tercantum di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹³ Andi Hamzah, dkk, 2006, "Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana" (Jakarta, TP.), hal. 41

¹⁴M. Yahya Harahap, 2012, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Pununtutan", Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal 436

yang berbunyi: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang". Dari bunyi pasal tersebut, dapat diartikan bahwa jika seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, maka prosedur agar penjatuhan sanksi dapat terlaksana adalah dengan berdasar kepada ketentuan yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁵

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. "Jika dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka konsekuensi logisnya penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam "kehidupan bernegara,".

D. Tinjauan Asas Kemanfaatan Hukum

Hukum adalah berbagai rumusan pengetahuan yang diterapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampaatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk

¹⁵M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, "*Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan penjelansa resmi*", Politea, Bogor,. hal 169.

menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemamfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa :

¹⁶keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (utility, doelmatigheid). Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

E. Tinjauan Asas Keadilan

Konsep keadilan sangat sulit untuk kita mencari tolak ukurnya karna adil oleh suatu pihak belum tentu adil menurut pihak yang

¹⁶ HM.soerya respationo,"putusan hakim:menuju rasionalitas hukum refleksif dalam penegakan hukum",jurnal hukum yustitia,NO 86 TH,XXII,mei-agustus 2013,fakultas hukum sebelas maret surakarta,hal.43

lainya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang artinya dapat di terima secara obyektif.¹⁷

Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni: Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.

1. Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numeric berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.
2. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).
3. Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima

¹⁷ Apeldoorn, 2000, hal. 11-12.

kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.¹⁸

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

¹⁸ Sewu, P, Lindawati S, 2006, "kegunaan Filsafat Hukum Dalam Mengupas Tuntas Permasalahna Hukum Kontekstual", Wacana Paramarta, hal 25.